



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.783, 2017

KEMENDAG. Nama Jabatan dan Kelas Jabatan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi, perlu mengatur kembali nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1095);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Kelas Jabatan.
- (3) Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Administrator dan Pengawas;
 - c. Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional; dan

- d. Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lainnya.

Pasal 3

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 534/M-DAG/KEP/4/2016 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
I	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	17
3.	Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	17
4.	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	17
5.	Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	17
6.	Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	17
7.	Inspektur Jenderal	17
8.	Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	17
9.	Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	17
10.	Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar	16
11.	Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa	16

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
12.	Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional	16
13.	Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga	16
II	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
	SEKRETARIAT JENDERAL	
1.	Kepala Biro Perencanaan	15
2.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	15
3.	Kepala Biro Keuangan	15
4.	Kepala Biro Hukum	15
5.	Kepala Biro Umum	15
6.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
7.	Kepala Biro Advokasi Perdagangan	15
8.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	15
9.	Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis	15
10.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian	15
11.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi	15
	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	15
2.	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	15

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
3.	Direktur Sarana Distribusi dan Logistik	15
4.	Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	15
5.	Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	15
	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	15
2.	Direktur Pemberdayaan Konsumen	15
3.	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu	15
4.	Direktur Metrologi	15
5.	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	15
6.	Direktur Tertib Niaga	15
	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	15
2.	Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	15
3.	Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	15
4.	Direktur Impor	15
5.	Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor	15
6.	Direktur Pengamanan Perdagangan	15
	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	15
2.	Direktur Perundingan Multilateral	15
3.	Direktur Perundingan ASEAN	15
4.	Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional	15
5.	Direktur Perundingan Bilateral	15
6.	Direktur Perundingan Perdagangan Jasa	15
	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	15
2.	Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	15
3.	Direktur Pengembangan Produk Ekspor	15
4.	Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor	15
5.	Direktur Pengembangan Promosi dan Citra	15
6.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	14
	INSPEKTORAT JENDERAL	
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
2.	Inspektur I	15
3.	Inspektur II	15
4.	Inspektur III	15

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
5.	Inspektur IV	15
	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	
1.	Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	15
2.	Kepala Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan	15
3.	Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik	15
4.	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar	15
5.	Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	15
	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	
1.	Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	15
2.	Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri	15
3.	Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri	15
4.	Kepala Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional	15

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
I.	JABATAN ADMINISTRATOR		
	SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Kepala Bagian Rencana dan Program	Biro Perencanaan	12
2.	Kepala Bagian Anggaran		12
3.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri		12
4.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan		12
5.	Kepala Bagian Organisasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian	12
6.	Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai		12
7.	Kepala Bagian Mutasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		12
8.	Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai		12
9.	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran		Biro Keuangan

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
10.	Kepala Bagian Perbendaharaan		12
11.	Kepala Bagian Akuntansi		12
12.	Kepala Bagian Barang Milik Negara		12
13.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Dalam Negeri	Biro Hukum	12
14.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Luar Negeri		12
15.	Kepala Bagian Bantuan Hukum		12
16.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Non Teknis Perdagangan dan Dokumentasi Hukum	Biro Hukum	12
17.	Kepala Bagian Tata Usaha	Biro Umum	12
18.	Kepala Bagian Rumah Tangga		12
19.	Kepala Bagian Perlengkapan		12
20.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan		12
21.	Kepala Bagian Strategi Komunikasi	Biro Hubungan Masyarakat	12
22.	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga		12
23.	Kepala Bagian Layanan Informasi Publik dan Perpustakaan		12
24.	Kepala Bagian Advokasi Perjanjian Perdagangan	Biro Advokasi Perdagangan	12
25.	Kepala Bagian Advokasi Sengketa Perdagangan		12
26.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pusat	12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	
27.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Non Aparatur		12
28.	Kepala Bagian Tata Usaha		12
29.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang		13
30.	Kepala Bidang Isu Strategis I	Pusat Penanganan Isu Strategis	12
31.	Kepala Bidang Isu Strategis II		12
32.	Kepala Bidang Isu Strategis III		12
33.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kemetropolitan	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetropolitan	12
34.	Kepala Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Teknologi Kemetropolitan		12
35.	Kepala Bagian Tata Usaha		12
36.	Kepala Bidang Perencanaan dan Kepatuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	12
37.	Kepala Bidang Manajemen Data		12
38.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi		12
39.	Kepala Bagian Tata Usaha		12
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
40.	Kepala Bagian Program dan Kerja Sama	Sekretariat	12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
41.	Kepala Bagian Keuangan	Ditjen Perdagangan	12
42.	Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan	Dalam Negeri	12
43.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum		12
44.	Kepala Subdirektorat Distribusi Langsung dan Waralaba	Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	12
45.	Kepala Subdirektorat Distribusi Tidak Langsung		12
46.	Kepala Subdirektorat Jasa Perdagangan Distribusi dan Bisnis		12
47.	Kepala Subdirektorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik		12
48.	Kepala Subdirektorat Informasi Perusahaan		12
49.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sarana Distribusi	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik	12
50.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sarana Distribusi		12
51.	Kepala Subdirektorat Kerja Sama Logistik		12
52.	Kepala Subdirektorat Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan		12
53.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi dan Perdagangan Antar Pulau		12
54.	Kepala Subdirektorat Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian dan Peternakan	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan	12
55.	Kepala Subdirektorat Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri dan Perikanan		12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	Kelautan	Barang Penting	
56.	Kepala Subdirektorat Barang Penting	Direktorat Barang	12
57.	Kepala Subdirektorat Informasi Pasar	Kebutuhan	12
58.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pokok dan Barang Penting	12
59.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Produk Lokal	Direktorat	12
60.	Kepala Subdirektorat Sarana dan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (MKMP)	Penggunaan dan Pemasaran	12
61.	Kepala Subdirektorat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN)	Produk Dalam Negeri	12
62.	Kepala Subdirektorat Peningkatan Akses Pasar		12
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA			
63.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Sekretariat	12
64.	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal	12
65.	Kepala Bagian Keuangan	Perlindungan	12
66.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Konsumen dan Tertib Niaga	12
67.	Kepala Subdirektorat Analisa Perlindungan Konsumen	Direktorat	12
68.	Kepala Subdirektorat Pelayanan Pengaduan Konsumen	Pemberdayaan Konsumen	12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
69.	Kepala Subdirektorat Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha		12
70.	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan		12
71.	Kepala Subdirektorat Jejaring Perlindungan Konsumen		12
72.	Kepala Subdirektorat Perumusan dan Penerapan Standar	Direktorat Standardisasi	12
73.	Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Sarana Mutu	dan Pengendalian Mutu	12
74.	Kepala Subdirektorat Verifikasi Mutu		12
75.	Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang		12
76.	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Standardisasi		12
77.	Kepala Balai Pengujian Mutu Barang		13
78.	Kepala Balai Kalibrasi		13
79.	Kepala Balai Sertifikasi		13
80.	Kepala Subdirektorat Analisa Kemetrolgian	Direktorat Metrologi	12
81.	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Penilaian Kemetrolgian		12
82.	Kepala Subdirektorat Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya		12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	(UTTP) dan Standar Ukuran		
83.	Kepala Subdirektorat Penilaian dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrolgian		12
84.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Bimbingan Operasional Kemetrolgian		12
85.	Kepala Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran		13
86.	Kepala Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya		13
87.	Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I		13
88.	Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II		13
89.	Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III		13
90.	Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV	Direktorat Metrologi	13
91.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Produk Logam, Mesin dan Elektronika	Direktorat Pengawasan	12
92.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka	Barang Beredar dan Jasa	12
93.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Jasa		12
94.	Kepala Subdirektorat Analisa Kasus Perlindungan Konsumen dan Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan		12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)		
95.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen		12
96.	Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pendaftaran Barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup)	Direktorat Tertib Niaga	12
97.	Kepala Subdirektorat Analisa Kasus Perdagangan dan Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan)		12
98.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan Perdagangan Lainnya		12
99.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur		12
	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI		
100.	Kepala Bagian Program dan Kerja Sama	Sekretariat	12
101.	Kepala Bagian Keuangan	Direktorat Jenderal	12
102.	Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan	Perdagangan	12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
103.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Luar Negeri	12
104.	Kepala Subdirektorat Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	12
105.	Kepala Subdirektorat Perkebunan		12
106.	Kepala Subdirektorat Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah-rempah		12
107.	Kepala Subdirektorat Kehutanan		12
108.	Kepala Subdirektorat Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Aneka	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	12
109.	Kepala Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		12
110.	Kepala Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia		12
111.	Kepala Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan		12
112.	Kepala Subdirektorat Barang Modal		Direktorat Impor
113.	Kepala Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	12	
114.	Kepala Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri	12	
115.	Kepala Subdirektorat Barang Konsumsi	12	
116.	Kepala Subdirektorat Barang Kimia Berbahaya, Tambang dan Limbah	12	
117.	Kepala Subdirektorat Ketentuan Asal Barang	Direktorat Fasilitasi Ekspor	12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
118.	Kepala Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor	dan Impor	12
119.	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan		12
120.	Kepala Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	12
121.	Kepala Subdirektorat Peningkatan Akses Pasar		12
122.	Kepala Subdirektorat Produk Agro	Direktorat	12
123.	Kepala Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimia	Pengamanan Perdagangan	12
124.	Kepala Subdirektorat Tekstil dan Produk Tekstil dan Produk Aneka		12
125.	Kepala Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika		12
	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL		
126.	Kepala Bagian Program dan Kerja Sama	Sekretariat	12
127.	Kepala Bagian Keuangan	Direktorat	12
128.	Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan	Jenderal Perundingan	12
129.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Perdagangan Internasional	12
130.	Kepala Subdirektorat Barang Pertanian	Direktorat	12
131.	Kepala Subdirektorat Barang Non	Perundingan	12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	Pertanian	Multilateral	
132.	Kepala Subdirektorat Instrumen Perdagangan dan Penanganan Sengketa		12
133.	Kepala Subdirektorat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Investasi, Lingkungan, dan Pembangunan		12
134.	Kepala Subdirektorat Transparansi Kesesuaian Peraturan dan Fasilitas		12
135.	Kepala Subdirektorat Fasilitas Perdagangan Barang ASEAN	Direktorat	12
136.	Kepala Subdirektorat Investasi, Usaha Kecil Menengah, Daya Saing dan Isu-Isu ASEAN	Perundingan ASEAN	12
137.	Kepala Subdirektorat Mitra Asia dan Pasifik	Direktorat	12
138.	Kepala Subdirektorat Mitra Amerika, Eropa dan Afrika	Perundingan ASEAN	12
139.	Kepala Subdirektorat Antar dan Sub Regional		12
140.	Kepala Subdirektorat Akses Perdagangan dan Akses Investasi APEC	Direktorat Perundingan	12
141.	Kepala Subdirektorat Fasilitas Perdagangan dan Fasilitas Investasi APEC	APEC dan Organisasi Internasional	12
142.	Kepala Subdirektorat Organisasi Komoditi		12
143.	Kepala Subdirektorat Organisasi Kelembagaan PBB dan Non PBB		12
144.	Kepala Subdirektorat Asia Selatan, Tengah dan Timur	Direktorat Perundingan	12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
145.	Kepala Subdirektorat Asia Tenggara dan Pasifik	Bilateral	12
146.	Kepala Subdirektorat Eropa		12
147.	Kepala Subdirektorat Amerika		12
148.	Kepala Subdirektorat Afrika dan Timur Tengah		12
149.	Kepala Subdirektorat Jasa Bisnis, Distribusi dan Keuangan	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa	12
150.	Kepala Subdirektorat Jasa Konstruksi, Pariwisata, Rekreasi, Budaya dan Olahraga		12
151.	Kepala Subdirektorat Jasa Pendidikan dan Kesehatan		12
152.	Kepala Subdirektorat Jasa Komunikasi, Lingkungan dan Energi		12
153.	Kepala Subdirektorat Jasa Transportasi dan Logistik		12
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL			
154.	Kepala Bagian Program dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	12
155.	Kepala Bagian Keuangan		12
156.	Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan		12
157.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum		12
158.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pasar Amerika dan Eropa	Direktur Pengembangan	12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
159.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pasar Asia Pasifik dan Afrika	Pasar dan Informasi Ekspor	12
160.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi Ekspor		12
161.	Kepala Subdirektorat Pelayanan Informasi Ekspor		12
162.	Kepala Subdirektorat Hasil Industri Manufaktur	Direktur Pengembangan Produk Ekspor	12
163.	Kepala Subdirektorat Produk Agro		12
164.	Kepala Subdirektorat Produk Kreatif		12
165.	Kepala Subdirektorat Jasa		12
166.	Kepala Subdirektorat Amerika dan Eropa	Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor	12
167.	Kepala Subdirektorat Asia Pasifik dan Afrika		12
168.	Kepala Subdirektorat Kerja Sama Antar Lembaga		12
169.	Kepala Subdirektorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa	Direktur Pengembangan Promosi dan Citra	12
170.	Kepala Subdirektorat Promosi Wilayah Asia Pasifik dan Afrika		12
171.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pemantauan Citra		12
172.	Kepala Subdirektorat Penerapan Citra		12
173.	Kepala Bagian Tata Usaha		Kepala Balai Besar
174.	Kepala Bidang Tata Operasional	12	

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
175.	Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	12
176.	Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor		12
INSPEKTORAT JENDERAL			
177.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	12
178.	Kepala Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		12
179.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Pengelolaan Kinerja		12
180.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		12
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI			
181.	Kepala Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat BAPPEBTI	12
182.	Kepala Bagian Keuangan		12
183.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum		12
184.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Informasi Publik		12
185.	Kepala Bagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan	12
186.	Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Administratif		12
187.	Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi		12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
188.	Kepala Bagian Pengawasan Transaksi	Biro Pengawasan	12
189.	Kepala Bagian Pengawasan Kepatuhan	Pasar Berjangka dan Fisik	12
190.	Kepala Bagian Audit		12
191.	Kepala Bagian Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar	12
192.	Kepala Bagian Pengembangan Pasar		12
193.	Kepala Bagian Pengembangan Data dan Teknologi Informasi		12
194.	Kepala Bagian Penguatan dan Pemberdayaan Sistem Resi Gudang	Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	12
195.	Kepala Bagian Pengawasan Sistem Resi Gudang		12
196.	Kepala Bagian Penguatan dan Pengawasan Pasar Lelang Komoditas	Komoditas	12
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN			
197.	Kepala Bagian Program dan Kerja Sama	Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	12
198.	Kepala Bagian Keuangan		12
199.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum		12
200.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan		12
201.	Kepala Bidang Barang Pokok, Barang Penting dan Logistik	Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri	12
202.	Kepala Bidang Pelaku dan Jasa Perdagangan		12

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
203.	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		12
204.	Kepala Bidang Ekspor	Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri	12
205.	Kepala Bidang Impor		12
206.	Kepala Bidang Pengamanan Perdagangan		12
207.	Kepala Bidang Multilateral	Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional	12
208.	Kepala Bidang Regional		12
209.	Kepala Bidang Bilateral		12
II. JABATAN PENGAWAS			
SEKRETARIAT JENDERAL			
210.	Kepala Subbagian Rencana dan Program I	Biro Perencanaan	9
211.	Kepala Subbagian Rencana dan Program II		9
212.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro		9
213.	Kepala Subbagian Anggaran Perdagangan Dalam Negeri		9
214.	Kepala Subbagian Anggaran Perdagangan Luar Negeri		9
215.	Kepala Subbagian Anggaran Unsur Penunjang	Biro Perencanaan	9
216.	Kepala Subbagian Kerja Sama Lintas Sektoral dan Regional		9
217.	Kepala Subbagian Bantuan Luar Negeri Bilateral		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
218.	Kepala Subbagian Bantuan Luar Negeri Multilateral		9
219.	Kepala Subbagian Evaluasi		9
220.	Kepala Subbagian Pelaporan		9
221.	Kepala Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan		9
222.	Kepala Subbagian Kelembagaan	Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
223.	Kepala Subbagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi		9
224.	Kepala Subbagian Standardisasi Jabatan dan Beban Kerja		9
225.	Kepala Subbagian Rekrutmen dan Seleksi		9
226.	Kepala Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai dan Jabatan Fungsional		9
227.	Kepala Subbagian Pengembangan Kompetensi Pegawai		9
228.	Kepala Subbagian Mutasi Kepegawaian		9
229.	Kepala Subbagian Kepangkatan dan Pemensiunan Pegawai		9
230.	Kepala Subbagian Sistem Informasi Kepegawaian		9
231.	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Pegawai		9
232.	Kepala Subbagian Disiplin dan Penghargaan		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS	
233.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9	
234.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran I	Biro Keuangan	9	
235.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran II		9	
236.	Kepala Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		9	
237.	Kepala Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan		9	
238.	Kepala Subbagian Penatausahaan dan Penyelesaian Kerugian Negara		9	
239.	Kepala Subbagian Urusan Gaji dan Tunjangan Kinerja		9	
240.	Kepala Subbagian Bimbingan Teknis Akuntansi		9	
241.	Kepala Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan		9	
242.	Kepala Subbagian Evaluasi Laporan Keuangan		9	
243.	Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara		9	
244.	Kepala Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara		9	
245.	Kepala Subbagian Administrasi dan Tata Usaha Biro		9	
246.	Kepala Subbagian Peraturan Perdagangan Dalam Negeri I		Biro Hukum	9
247.	Kepala Subbagian Peraturan Perdagangan			9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	Dalam Negeri II		
248.	Kepala Subbagian Peraturan Peraturan Perdagangan Dalam Negeri III		9
249.	Kepala Subbagian Peraturan Bidang Ekspor		9
250.	Kepala Subbagian Peraturan Bidang Impor		9
251.	Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perundingan Perdagangan Internasional dan Pengamanan Perdagangan		9
252.	Kepala Subbagian Litigasi I		9
253.	Kepala Subbagian Litigasi II		9
254.	Kepala Subbagian Non Litigasi		9
255.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Non Teknis Perdagangan	Biro Hukum	9
256.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum		9
257.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
258.	Kepala Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas	Biro Umum	9
259.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan		9
260.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro		9
261.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri		9
262.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS	
263.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli		9	
264.	Kepala Subbagian Urusan Dalam		9	
265.	Kepala Subbagian Pemeliharaan		9	
266.	Kepala Subbagian Keamanan		9	
267.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kebutuhan		9	
268.	Kepala Subbagian Pengelolaan dan Penataan Aset		9	
269.	Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan		9	
270.	Kepala Subbagian Pelaksanaan I		9	
271.	Kepala Subbagian Pelaksanaan II		9	
272.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Pelaporan		9	
273.	Kepala Subbagian Media Massa		Biro Hubungan Masyarakat	9
274.	Kepala Subbagian Monitoring dan Analisis Berita			9
275.	Kepala Subbagian Multimedia			9
276.	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Negara dan Pemerintah	9		
277.	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah	9		
278.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9		
279.	Kepala Subbagian Layanan Informasi Publik	Biro Hubungan Masyarakat		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
280.	Kepala Subbagian Perpustakaan		9
281.	Kepala Subbagian Advokasi Perjanjian Perdagangan Barang	Biro Advokasi Perdagangan	9
282.	Kepala Subbagian Advokasi Perjanjian Perdagangan Jasa dan Investasi		9
283.	Kepala Subbagian Advokasi Sengketa Tindakan Antidumping, Imbalan dan Pengamanan Perdagangan		9
284.	Kepala Subbagian Advokasi Sengketa Perjanjian Perdagangan Internasional		9
285.	Kepala Subbagian Implementasi dan Tata Usaha Biro		9
286.	Kepala Subbidang Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Aparatur		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan
287.	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	9	
288.	Kepala Subbidang Program dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Non Aparatur	9	
289.	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Non Aparatur	9	
290.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengelola Jabatan Fungsional	9	
291.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	
292.	Kepala Subbagian Umum	9	
293.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Pendidikan	9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
294.	Kepala Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan	dan Pelatihan Penguji Mutu Barang	9
295.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		9
296.	Kepala Subbidang Isu Keuangan dan Investasi	Pusat Penanganan Isu Strategis	9
297.	Kepala Subbidang Isu Pertambangan, Energi, dan Kemaritiman		9
298.	Kepala Subbidang Isu Industri dan Ketenagakerjaan		9
299.	Kepala Subbidang Isu Pertanian, Kehutanan, dan Pariwisata		9
300.	Kepala Subbidang Isu Politik, Sosial, dan Budaya		9
301.	Kepala Subbidang Isu Teknis Perdagangan		9
302.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
303.	Kepala Subbidang Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian		Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian
304.	Kepala Subbidang Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian	9	
305.	Kepala Subbidang Kerja Sama Kemetrolgian	9	
306.	Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi Kemetrolgian	9	

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
307.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		9
308.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian		9
309.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Arsitektur	Pusat Data dan Sistem Informasi	9
310.	Kepala Subbidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko		9
311.	Kepala Subbidang Metodologi dan Pengumpulan Data		9
312.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Pelayanan Data		9
313.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi		9
314.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan dan Infrastruktur	Pusat Data dan Sistem Informasi	9
315.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum		9
316.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan		9
	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI		
317.	Kepala Subbagian Program	Sekretariat	9
318.	Kepala Subbagian Anggaran	Direktorat Jenderal	9
319.	Kepala Subbagian Kerja Sama	Perdagangan	9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
320.	Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji	Dalam Negeri	9
321.	Kepala Subbagian Akuntansi		9
322.	Kepala Subbagian Barang Milik Negara		9
323.	Kepala Subbagian Hukum		9
324.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan		9
325.	Kepala Subbagian Informasi Publik		9
326.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi		9
327.	Kepala Subbagian Umum		9
328.	Kepala Subbagian Tata Usaha		Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
329.	Kepala Seksi Sistem dan Pengawasan Distribusi Langsung dan Waralaba	9	
330.	Kepala Seksi Pelaku Distribusi Langsung dan Waralaba	9	
331.	Kepala Seksi Sistem dan Pengawasan Distribusi Tidak Langsung	9	
332.	Kepala Seksi Pelaku Distribusi Tidak Langsung	9	
333.	Kepala Seksi Sistem dan Pengawasan Jasa Perdagangan, Distribusi, dan Bisnis	9	
334.	Kepala Seksi Pelaku Jasa Perdagangan, Distribusi, dan Bisnis	9	
335.	Kepala Seksi Sistem dan Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	9	

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
336.	Kepala Seksi Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	9
337.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan		9
338.	Kepala Seksi Analisa Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan		9
339.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
340.	Kepala Seksi Pengembangan Pasar Rakyat	Direktorat Sarana	9
341.	Kepala Seksi Pengembangan Pusat Distribusi dan Pergudangan	Distribusi dan Logistik	9
342.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Aktivasi Pasar Rakyat		9
343.	Kepala Seksi Optimalisasi Pusat Distribusi dan Pergudangan		9
344.	Kepala Seksi Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik		9
345.	Kepala Seksi Informasi Logistik		9
346.	Kepala Seksi Perdagangan Antar Pulau		9
347.	Kepala Seksi Perdagangan Perbatasan		9
348.	Kepala Seksi Pengawasan Sarana Distribusi		9
349.	Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan		9
350.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat	9
351.	Kepala Seksi Hasil Pertanian	Barang	9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
352.	Kepala Seksi Hasil Peternakan	Kebutuhan Pokok dan	9
353.	Kepala Seksi Hasil Industri	Barang Penting	9
354.	Kepala Seksi Hasil Perikanan dan Kelautan		9
355.	Kepala Seksi Hasil Industri		9
356.	Kepala Seksi Hasil Penunjang Pertanian dan Pertambangan		9
357.	Kepala Seksi Informasi Harga	Direktorat Barang	9
358.	Kepala Seksi Informasi Stok	Kebutuhan Pokok dan	9
359.	Kepala Seksi Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok	Barang Penting	9
360.	Kepala Seksi Pengawasan Barang Penting		9
361.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
362.	Kepala Seksi Peningkatan Potensi Produk	Direktorat Penggunaan dan	9
363.	Kepala Seksi Fasilitasi Penguatan Produk	Pemasaran	9
364.	Kepala Seksi Sarana Usaha	Produk Dalam Negeri	9
365.	Kepala Seksi Iklim Usaha		9
366.	Kepala Seksi Kerjasama dan Aktivasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)		9
367.	Kepala Seksi Produk Kreatif Lokal Unggulan Daerah Berbasis Budaya		9
368.	Kepala Seksi Promosi		9
369.	Kepala Seksi Kemitraan Pemasaran		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA		
370.	Kepala Subbagian Program	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	9
371.	Kepala Subbagian Anggaran		9
372.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan		9
373.	Kepala Subbagian Hukum		9
374.	Kepala Subbagian Kerja Sama		9
375.	Kepala Subbagian Informasi Publik		9
376.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara		9
377.	Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji		9
378.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi		9
379.	Kepala Subbagian Umum		9
380.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	9
381.	Kepala Seksi Analisa Perlindungan Konsumen		9
382.	Kepala Seksi Evaluasi Perlindungan Konsumen		9
383.	Kepala Seksi Konsultasi		9
384.	Kepala Seksi Penanganan Pengaduan		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
385.	Kepala Seksi Bimbingan Konsumen		9
386.	Kepala Seksi Bimbingan Pelaku Usaha		9
387.	Kepala Seksi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat		9
388.	Kepala Seksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen		9
389.	Kepala Seksi Jejaring Perlindungan Konsumen Dalam Negeri		9
390.	Kepala Seksi Jejaring Perlindungan Konsumen Luar Negeri		9
391.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	9
392.	Kepala Seksi Perumusan Standar		9
393.	Kepala Seksi Penerapan Standar		9
394.	Kepala Seksi Bimbingan Mutu		9
395.	Kepala Seksi Sarana Mutu		9
396.	Kepala Seksi Verifikasi Mutu Produk Dalam Negeri dan Barang Ekspor		9
397.	Kepala Seksi Verifikasi dan Pengendalian Mutu Barang Impor		9
398.	Kepala Seksi Bimbingan		9
399.	Kepala Seksi Evaluasi		9
400.	Kepala Seksi Kelembagaan Standardisasi Nasional		9
401.	Kepala Seksi Kelembagaan Standardisasi Internasional		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
402.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Pengujian	9
403.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengujian	Mutu Barang	9
404.	Kepala Seksi Pengembangan Jasa Pengujian	Balai Pengujian Mutu Barang	9
405.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Kalibrasi	9
406.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi		9
407.	Kepala Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi		9
408.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Sertifikasi	9
409.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi		9
410.	Kepala Seksi Pengembangan Jasa Sertifikasi		9
411.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat	9
412.	Kepala Seksi Piranti Keras	Metrologi	9
413.	Kepala Seksi Piranti Lunak		9
414.	Kepala Seksi Kelembagaan		9
415.	Kepala Seksi Penilaian		9
416.	Kepala Seksi Besaran Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu		9
417.	Kepala Seksi Besaran Arus, Panjang dan Volume		9
418.	Kepala Seksi Pengamat Tera dan Pengawas Kemetrologian		9
419.	Kepala Seksi Penera dan Pranata		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	Laboratorium Kemetrolgian		
420.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Kemetrolgian		9
421.	Kepala Seksi Bimbingan Operasional Kemetrolgian		9
422.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai	9
423.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	Pengelolaan Standar Nasional	9
424.	Kepala Seksi Bimbingan Mutu	Satuan Ukuran	9
425.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Pengujian	9
426.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	Alat-alat Ukur,	9
427.	Kepala Seksi Bimbingan Mutu	Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	9
428.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai	9
429.	Kepala Seksi Pelayanan Kemetrolgian	Standardisasi	9
430.	Kepala Seksi Bimbingan Kemetrolgian	Metrologi Legal Regional I	9
431.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai	9
432.	Kepala Seksi Pelayanan Kemetrolgian	Standardisasi	9
433.	Kepala Seksi Bimbingan Kemetrolgian	Metrologi Legal Regional II	9
434.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai	9
435.	Kepala Seksi Pelayanan Kemetrolgian	Standardisasi	9
436.	Kepala Seksi Bimbingan Kemetrolgian	Metrologi Legal Regional III	9
437.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai	9
438.	Kepala Seksi Pelayanan Kemetrolgian	Standardisasi	9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS	
439.	Kepala Seksi Bimbingan Kemetrolgian	Metrologi Legal Regional IV	9	
440.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	9	
441.	Kepala Seksi Pengawasan Produk Logam dan Mesin		9	
442.	Kepala Seksi Pengawasan Produk Elektronika		9	
443.	Kepala Seksi Pengawasan Produk Hasil Pertanian		9	
444.	Kepala Seksi Pengawasan Produk Hasil Kimia dan Aneka		9	
445.	Kepala Seksi Jasa Distribusi		9	
446.	Kepala Seksi Jasa Bisnis		9	
447.	Kepala Seksi Analisa Kasus Perlindungan Konsumen		9	
448.	Kepala Seksi Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)		9	
449.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Pengawasan Produk Logam, Mesin dan Elektronika dan Jasa Distribusi		Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	9
450.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka dan Jasa Bisnis			9
451.	Kepala Subbagian Tata Usaha		Direktorat Tertib Niaga	9
452.	Kepala Seksi Pengawasan Barang K3L			9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	(Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup)		
453.	Kepala Seksi Pendaftaran Barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup)		9
454.	Kepala Seksi Analisa Kasus Perdagangan		9
455.	Kepala Seksi Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan)		9
456.	Seksi Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Lainnya		9
457.	Seksi Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Luar Negeri		9
458.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Penting		9
459.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Distribusi Barang yang Diatur		9
	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI		
460.	Kepala Subbagian Program	Sekretariat	9
461.	Kepala Subbagian Anggaran	Direktorat Jenderal	9
462.	Kepala Subbagian Kerja Sama	Perdagangan Luar Negeri	9
463.	Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji		9
464.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang	Sekretariat Direktorat	9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	Milik Negara	Jenderal	
465.	Kepala Subbagian Hukum	Perdagangan Luar Negeri	9
466.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan		9
467.	Kepala Subbagian Informasi Publik		9
468.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi		9
469.	Kepala Subbagian Umum		9
470.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
471.	Kepala Seksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	9
472.	Kepala Seksi Perikanan dan Peternakan		9
473.	Kepala Seksi Tanaman Tahunan		9
474.	Kepala Seksi Tanaman Semusim		9
475.	Kepala Seksi Tanaman Bahan Penyegar		9
476.	Kepala Seksi Rempah - Rempah		9
477.	Kepala Seksi Hasil Kayu dan Produk Kayu		9
478.	Kepala Seksi Hasil Hutan Bukan Kayu		9
479.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	9
480.	Kepala Seksi Tekstil dan Produk Tekstil		9
481.	Kepala Seksi Produk Aneka		9
482.	Kepala Seksi Produk Logam dan Mesin		9
483.	Kepala Seksi Produk Alat Transportasi dan Elektronika		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
484.	Kepala Seksi Produk Industri Agro		9
485.	Kepala Seksi Produk Kimia		9
486.	Kepala Seksi Produk Minyak dan Gas Bumi (Migas)		9
487.	Kepala Seksi Produk Pertambangan		9
488.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Impor	9
489.	Kepala Seksi Mesin dan Peralatan Mesin		9
490.	Kepala Seksi Alat Angkut		9
491.	Kepala Seksi Barang Pertanian dan Kehutanan		9
492.	Kepala Seksi Barang Kelautan dan Perikanan	Direktorat Impor	9
493.	Kepala Seksi Barang Aneka Industri		9
494.	Kepala Seksi Bahan Baku Industri		9
495.	Kepala Seksi Barang Konsumsi Tahan Lama		9
496.	Kepala Seksi Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama		9
497.	Kepala Seksi Barang Kimia dan Bahan Berbahaya		9
498.	Kepala Seksi Barang Tambang dan Limbah		9
499.	Kepala Subbagian Tata Usaha		Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
500.	Kepala Seksi Prosedur Ketentuan Asal Barang	9	

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
501.	Kepala Seksi Surat Keterangan Asal		9
502.	Kepala Seksi Analisa dan Kerjasama Pelayanan Ekspor dan Impor		9
503.	Kepala Seksi Fasilitas Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor		9
504.	Kepala Seksi Transportasi dan Kepelabuhanan		9
505.	Kepala Seksi Kawasan Perdagangan		9
506.	Kepala Seksi Sistem Pembiayaan		9
507.	Kepala Seksi Sistem Pembayaran		9
508.	Kepala Seksi Informasi Akses Pasar		9
509.	Kepala Seksi Imbal Dagang		9
510.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
511.	Kepala Seksi Produk Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Direktorat Pengamanan Perdagangan	9
512.	Kepala Seksi Produk Hasil Perikanan dan Peternakan		9
513.	Kepala Seksi Produk Logam dan Mesin		9
514.	Kepala Seksi Produk Kimia		9
515.	Kepala Seksi Tekstil dan Produk Tekstil		9
516.	Kepala Seksi Produk Aneka		9
517.	Kepala Seksi Produk Alat Transportasi	Direktorat Pengamanan Perdagangan	9
518.	Kepala Seksi Produk Telematika dan Elektronika		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL		
519.	Kepala Subbagian Program	Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	9
520.	Kepala Subbagian Anggaran		9
521.	Kepala Subbagian Kerja Sama		9
522.	Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji		9
523.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara		9
524.	Kepala Subbagian Hukum		9
525.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan		9
526.	Kepala Subbagian Informasi Publik		9
527.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi		9
528.	Kepala Subbagian Umum		9
529.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perundingan Multilateral	9
530.	Kepala Seksi Tarif Barang Pertanian		9
531.	Kepala Seksi Non Tarif Barang Pertanian		9
532.	Kepala Seksi Tarif Barang Non Pertanian		9
533.	Kepala Seksi Non Tarif Barang Non Pertanian		9
534.	Kepala Seksi Instrumen Perdagangan		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
535.	Kepala Seksi Penanganan Sengketa		9
536.	Kepala Seksi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Investasi		9
537.	Kepala Seksi Lingkungan dan Pembangunan		9
538.	Kepala Seksi Notifikasi dan Fasilitasi		9
539.	Kepala Seksi Kesesuaian dan Tinjauan		9
540.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perundingan ASEAN	9
541.	Kepala Seksi Akses Pasar, Rules of Origin dan Non Tariff Measures		9
542.	Kepala Seksi Kepabeanan, Standar dan Sanitary and Phytosanitary		9
543.	Kepala Seksi Investasi dan Usaha Kecil Menengah		9
544.	Kepala Seksi Daya Saing dan Isu-Isu ASEAN		9
545.	Kepala Seksi Mitra Asia Timur		9
546.	Kepala Seksi Mitra Asia Selatan, Pasifik dan Timur Tengah		9
547.	Kepala Seksi Mitra Amerika		9
548.	Kepala Seksi Mitra Eropa dan Afrika		9
549.	Kepala Seksi Antar Regional		9
550.	Kepala Seksi Sub Regional		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
551.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perundingan	9
552.	Kepala Seksi Akses Perdagangan APEC	APEC dan Organisasi Internasional	9
553.	Kepala Seksi Akses Investasi APEC	Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional	9
554.	Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan APEC		9
555.	Kepala Seksi Fasilitasi Investasi APEC		9
556.	Kepala Seksi Organisasi Komoditi Tanaman Semusim, Tanaman Tahunan, dan Kehutanan		9
557.	Kepala Seksi Organisasi Komoditi Tanaman Rempah, Tanaman Penyegar, Perikanan dan Peternakan		9
558.	Kepala Seksi Organisasi Kelembagaan PBB		9
559.	Kepala Seksi Organisasi Non PBB		9
560.	Kasubbag Tata Usaha		9
561.	Kepala Seksi Asia Selatan dan Tengah	Direktorat Perundingan Bilateral	9
562.	Kepala Seksi Asia Timur		9
563.	Kepala Seksi Asia Tenggara		9
564.	Kepala Seksi Pasifik	Direktorat Perundingan Bilateral	9
565.	Kepala Seksi Uni Eropa		9
566.	Kepala Seksi Non Uni Eropa		9
567.	Kepala Seksi Amerika Utara		9
568.	Kepala Seksi Amerika Tengah dan Selatan		9
569.	Kepala Seksi Afrika		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
570.	Kepala Seksi Timur Tengah		9
571.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa	9
572.	Kepala Seksi Jasa Bisnis dan Distribusi		9
573.	Kepala Seksi Jasa Keuangan		9
574.	Kepala Seksi Jasa Konstruksi		9
575.	Kepala Seksi Jasa Pariwisata, Rekreasi, Budaya dan Olahraga		9
576.	Kepala Seksi Jasa Pendidikan		9
577.	Kepala Seksi Jasa Kesehatan		9
578.	Kepala Seksi Jasa Komunikasi		9
579.	Kepala Seksi Jasa Lingkungan dan Energi		9
580.	Kepala Seksi Jasa Transportasi		9
581.	Kepala Seksi Jasa Logistik		9
	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL		
582.	Kepala Subbagian Program	Sekretariat	9
583.	Kepala Subbagian Anggaran	Direktorat Jenderal	9
584.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Kerja Sama	Pengembangan Ekspor Nasional	9
585.	Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji		9
586.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
587.	Kepala Subbagian Hukum		9
588.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan		9
589.	Kepala Subbagian Informasi Publik		9
590.	Kepala Subbagian Kepegawaian		9
591.	Kepala Subbagian Umum		9
592.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
593.	Kepala Seksi Amerika	Direktorat	9
594.	Kepala Seksi Eropa	Pengembangan Pasar dan	9
595.	Kepala Seksi Asia Pasifik	Informasi Ekspor	9
596.	Kepala Seksi Afrika		9
597.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Ekspor		9
598.	Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Informatika		9
599.	Kepala Seksi Pelayanan Pelaku Usaha		9
600.	Kepala Seksi Publikasi Informasi Ekspor		9
601.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat	9
602.	Kepala Seksi Mesin, Logam, Elektronika dan Telematika	Pengembangan Produk Ekspor	9
603.	Kepala Seksi Pangan, Tekstil dan Produk Tekstil, Alat Kesehatan dan Aneka		9
604.	Kepala Seksi Kehutanan dan Perkebunan		9
605.	Kepala Seksi Pertanian dan Perikanan		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
606.	Kepala Seksi Media dan Iptek		9
607.	Kepala Seksi Seni Budaya dan Desain		
608.	Kepala Seksi Jasa Bisnis dan Profesi		9
609.	Kepala Seksi Jasa Konstruksi dan Distribusi		9
610.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
611.	Kepala Seksi Amerika	Direktorat Kerja Sama	9
612.	Kepala Seksi Eropa	Pengembangan	9
613.	Kepala Seksi Asia Pasifik	Ekspor	9
614.	Kepala Seksi Afrika		9
615.	Kepala Seksi Pemerintah		9
616.	Kepala Seksi Non Pemerintah		9
617.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
618.	Kepala Seksi Amerika	Direktorat	9
619.	Kepala Seksi Eropa	Pengembangan	9
620.	Kepala Seksi Asia Pasifik	Promosi dan Citra	9
621.	Kepala Seksi Afrika		9
622.	Kepala Seksi Perencanaan	Direktorat Pengembangan	9
623.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi	Promosi dan Citra	9
624.	Kepala Seksi Dalam Negeri		9
625.	Kepala Seksi Luar Negeri		9
626.	Kepala Subbagian Keuangan	Balai Besar	9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
627.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Persuratan	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	9
628.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga		9
629.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi		9
630.	Kepala Seksi Penyelenggaraan		9
631.	Kepala Seksi Promosi dan Publikasi		9
632.	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Jasa		9
633.	Kepala Seksi Analisis Kebutuhan		9
634.	Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum		9
	INSPEKTORAT JENDERAL		
635.	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	Sekretariat Inspektorat Jenderal	9
636.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan		9
637.	Kepala Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan		9
638.	Kepala Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		9
639.	Kepala Subbagian Kepegawaian		9
640.	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja		9
641.	Kepala Subbagian Umum		9
642.	Kepala Subbagian Keuangan		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
643.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat I	9
644.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat II	9
645.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat III	9
646.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat IV	9
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI			
647.	Kepala Subbagian Program	Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	9
648.	Kepala Subbagian Anggaran		9
649.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan		9
650.	Kepala Subbagian Perbendaharaan, Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak		9
651.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi		9
652.	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara		9
653.	Kepala Subbagian Kepegawaian		9
654.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga		9
655.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perpustakaan		9
656.	Kepala Subbagian Kerja Sama Media		9
657.	Kepala Subbagian Kerja Sama Kelembagaan	9	
658.	Kepala Subbagian Informasi Publik	9	

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
659.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Peraturan	9
660.	Kepala Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan	Perundangan-undangan dan Penindakan	9
661.	Kepala Subbagian Pelayanan Hukum		9
662.	Kepala Subbagian Penindakan Pelanggaran Administratif I		9
663.	Kepala Subbagian Penindakan Pelanggaran Administratif II		9
664.	Kepala Subbagian Penindakan Pelanggaran Transaksi I		9
665.	Kepala Subbagian Penindakan Pelanggaran Transaksi II		9
666.	Kepala Subbagian Pengawasan Transaksi Multilateral		Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
667.	Kepala Subbagian Pengawasan Transaksi Bilateral	9	
668.	Kepala Subbagian Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Keuangan	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik	9
669.	Kepala Subbagian Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha		9
670.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
671.	Kepala Subbagian Audit I		9
672.	Kepala Subbagian Audit II		9
673.	Kepala Subbagian Penguatan Kelembagaan	Biro Pembinaan dan	9
674.	Kepala Subbagian Penguatan Pelaku Pasar		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
675.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pengembangan Pasar	9
676.	Kepala Subbagian Pengembangan Kelembagaan		9
677.	Kepala Subbagian Pengembangan Produk		9
678.	Kepala Subbagian Data		9
679.	Kepala Subbagian Teknologi Informasi		9
680.	Kepala Subbagian Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang	Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	9
681.	Kepala Subbagian Pemberdayaan Pelaku Sistem Resi Gudang		9
682.	Kepala Subbagian Tata Usaha		9
683.	Kepala Subbagian Pengawasan Kelembagaan Sistem Resi Gudang		9
684.	Kepala Subbagian Pengawasan Transaksi Sistem Resi Gudang		9
685.	Kepala Subbagian Penguatan Pasar Lelang Komoditas		9
686.	Kepala Subbagian Pengawasan Pasar Lelang Komoditas		9
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN			
687.	Kepala Subbagian Program	Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan	9
688.	Kepala Subbagian Anggaran		9
689.	Kepala Subbagian Kerja Sama		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
690.	Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji	Perdagangan	9
691.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi		9
692.	Kepala Subbagian Inventarisasi Kekayaan Milik Negara		9
693.	Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Tata Laksana		9
694.	Kepala Subbagian Pengembangan Kepegawaian		9
695.	Kepala Subbagian Umum		9
696.	Kepala Subbagian Evaluasi		9
697.	Kepala Subbagian Pelaporan		9
698.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi		9
699.	Kepala Subbagian Tata Usaha		Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri
700.	Kepala Subbidang Barang Pokok dan Barang Penting	9	
701.	Kepala Subbidang Logistik	9	
702.	Kepala Subbidang Pelaku Perdagangan	9	
703.	Kepala Subbidang Jasa Perdagangan	9	
704.	Kepala Subbidang Perlindungan Konsumen	9	
705.	Kepala Subbidang Tertib Niaga	9	
706.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pusat Pengkajian Perdagangan	
707.	Kepala Subbidang Daya Saing Ekspor		9

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS
708.	Kepala Subbidang Promosi Ekspor	Luar Negeri	9
709.	Kepala Subbidang Barang Konsumsi		9
710.	Kepala Subbidang Bahan Baku Penolong dan Barang Modal		9
711.	Kepala Subbidang Pengamanan Pasar Ekspor		9
712.	Kepala Subbidang Pengamanan Pasar Domestik		9
713.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional	9
714.	Kepala Subbidang Akses Pasar Barang		9
715.	Kepala Subbidang Akses Pasar Jasa dan Isu Baru		9
716.	Kepala Subbidang ASEAN		9
717.	Kepala Subbidang Non ASEAN		9
718.	Kepala Subbidang Bilateral I		9
719.	Kepala Subbidang Bilateral II		9

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
I.	Rumpun Manajemen	
1.	Analisis Kebijakan	
	a. Analisis Kebijakan Ahli Utama	13
	b. Analisis Kebijakan Ahli Madya	11
	c. Analisis Kebijakan Ahli Muda	9
	d. Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
2.	Analisis Kepegawaian	
	a. Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11
	b. Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9
	c. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8
	d. Analisis Kepegawaian Terampil Penyelia	8
	e. Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
	f. Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana/Terampil	6

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
3.	Perencana		
	a.	Perencana Ahli Utama	13
	b.	Perencana Ahli Madya	11
	c.	Perencana Ahli Muda	9
	d.	Perencana Ahli Pertama	8
4.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
	a.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9
	b.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
5.	Penerjemah		
	a.	Penerjemah Ahli Pertama	8
II.	Rumpun Akuntansi dan Anggaran		
6.	Auditor		
	a.	Auditor Ahli Utama	13
	b.	Auditor Ahli Madya	11
	c.	Auditor Ahli Muda	9
	d.	Auditor Ahli Pertama	8
	e.	Auditor Terampil Penyelia	8
	f.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
	g.	Auditor Terampil Pelaksana/ Terampil	6
III.	Rumpun Hukum dan Peradilan		

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan		
	a.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	13
	b.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11
	c.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9
	d.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
IV	Rumpun Kekomputeran		
8.	Pranata Komputer		
	a.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
	b.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
	c.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
	d.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
	e.	Pranata Komputer Terampil Penyelia	8
	f.	Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
	g.	Pranata Komputer Terampil Pelaksana/ Terampil	6
V	Rumpun Matematika, Statistik dan yang berkaitan		
9.	Statistisi		
	a.	Statistisi Ahli Madya	11
	b.	Statistisi Ahli Muda	9

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
	c.	Statistisi Ahli Pertama	8
	d.	Statistisi Terampil Penyelia	8
	e.	Statistisi Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
	f.	Statistisi Terampil Pelaksana/ Terampil	6
VI	Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan		
10.	Penera		
	a.	Penera Ahli Madya	11
	b.	Penera Ahli Muda	9
	c.	Penera Ahli Pertama	8
	d.	Penera Terampil Penyelia	8
	e.	Penera Terampil Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7
	f.	Penera Terampil/ Terampil Pelaksana	6
11.	Pengamat Tera		
	a.	Pengamat Tera Terampil Penyelia	8
	b.	Pengamat Tera Terampil Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7
	c.	Pengamat Tera Terampil/ Terampil Pelaksana	6
	d.	Pengamat Tera Terampil Pemula	5
12.	Pengawas Kemetrolgian		
	a.	Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya	11
	b.	Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	9

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
	c.	Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	8
13.	Pranata Laboratorium Kemetrolgian		
	a.	Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Madya	11
	b.	Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda	9
	c.	Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama	8
14.	Penguji Mutu Barang		
	a.	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	11
	b.	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	9
	c.	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	8
	d.	Penguji Mutu Barang Terampil Penyelia	9
	e.	Penguji Mutu Barang Terampil Mahir/ Pelaksana Lanjutan	8
	f.	Penguji Mutu Barang Terampil/ Terampil Pelaksana	7
	g.	Penguji Mutu Barang Terampil Pemula	5
VII	Rumpun Penerangan dan Seni Budaya		
15.	Pranata Humas		
	a.	Pranata Humas Ahli Madya	11
	b.	Pranata Humas Ahli Muda	9
	c.	Pranata Humas Ahli Pertama	8
	d.	Pranata Humas Terampil Penyelia	8
	e.	Pranata Humas Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
	f.	Pranata Humas Terampil Pelaksana/ Terampil	6
VIII	Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan		
16.	Arsiparis		
	a.	Arsiparis Ahli Utama	13
	b.	Arsiparis Ahli Madya	11
	c.	Arsiparis Ahli Muda	9
	d.	Arsiparis Ahli Pertama	8
	e.	Arsiparis Terampil Penyelia	8
	f.	Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
	g.	Arsiparis Terampil Pelaksana/ Terampil	6
17.	Pustakawan		
	a.	Pustakawan Ahli Madya	11
	b.	Pustakawan Ahli Muda	9
	c.	Pustakawan Ahli Pertama	8
	d.	Pustakawan Terampil Penyelia	8
	e.	Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
	f.	Pustakawan Terampil Pelaksana/ Terampil	6
IX	Rumpun Kesehatan		
18.	Dokter		

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
	a.	Dokter Ahli Utama	13
	b.	Dokter Ahli Madya	11
	c.	Dokter Ahli Muda	9
	d.	Dokter Ahli Pertama	8
19.	Dokter Gigi		
	a.	Dokter Gigi Ahli Utama	13
	b.	Dokter Gigi Ahli Madya	11
	c.	Dokter Gigi Ahli Muda	9
	d.	Dokter Gigi Ahli Pertama	8
20.	Pranata Laboratorium Kesehatan		
	a.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11
	b.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9
	c.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8
	d.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Penyelia	8
	e.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
	f.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana/ Terampil	6
21.	Asisten Apoteker		
	a.	Asisten Apoteker Terampil Penyelia	8
	b.	Asisten Apoteker Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
	c.	Asisten Apoteker Terampil Pelaksana/ Terampil	6

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
22.	Perawat		
	a.	Perawat Ahli Madya	11
	b.	Perawat Ahli Muda	9
	c.	Perawat Ahli Pertama	8
	d.	Perawat Terampil Penyelia	8
	e.	Perawat Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
	f.	Perawat Terampil Pelaksana/ Terampil	6
X	Rumpun Penelitian dan perekayasaan		
23.	Peneliti		
	a.	Peneliti Ahli Utama	13
	b.	Peneliti Ahli Madya	11
	c.	Peneliti Ahli Muda	9
	d.	Peneliti Ahli Pertama	8
XI	Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi		
24.	Dosen		
	a.	Dosen Lektor Kepala	13
	b.	Dosen Lektor	11
	c.	Dosen Asisten Ahli	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
XII	Rumpun Pendidikan Lainnya	
25.	Widyaiswara	
	a. Widyaiswara Ahli Utama	13
	b. Widyaiswara Ahli Madya	11
	c. Widyaiswara Ahli Muda	9
	d. Widyaiswara Ahli Pertama	8
26.	Pranata Laboratorium Pendidikan	
	a. Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
	b. Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7
	c. Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
STAF KHUSUS MENTERI		
1.	Staf Khusus Menteri	15
PERWAKILAN LUAR NEGERI		
1.	Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei	15
2.	Wakil Kepala KDEI Taipei	14
3.	Kepala Bagian Administrasi	12
4.	Kepala Bidang Imigrasi	12
5.	Kepala Bidang Industri	12
6.	Kepala Bidang Investasi	12
7.	Kepala Bidang Perdagangan	12
8.	Kepala Bidang Pariwisata dan Perhubungan	12
9.	Kepala Bidang Tenaga Kerja	12
10.	Kepala Subbagian Protokol dan Konsuler	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
11.	Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian	9
12.	Atase Perdagangan	13
13.	Kepala ITPC	13
14.	Wakil Kepala ITPC	10
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI		
1.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	9
2.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	9
RUMPUN HUKUM		
1.	Penyusun Abstraksi Hukum	8
2.	Pemberi Konsultasi Bantuan Hukum	8
RUMPUN TEKNIS PERDAGANGAN		
3.	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	8
4.	Pengawas Resi Gudang	8
5.	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	8
6.	Analisis Pengembangan Jasa Sertifikasi	8
7.	Pengawas Transaksi Pasar Lelang	7
8.	Analisis Perdagangan	7
9.	Fasilitator Perdagangan	7
10.	Analisis Manajemen Mutu	7
RUMPUN ORGANISASI DAN KEDIKLATAN		
11.	Penyusun Rencana Organisasi dan Tata Laksana	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
12.	Analisis Organisasi	7
13.	Analisis Pendidikan dan Pelatihan	7
14.	Pengelola Kependidikan dan Pelatihan	6
RUMPUN KEUANGAN DAN BMN		
15.	Analisis Akuntansi dan Persediaan	7
16.	Analisis Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	7
17.	Analisis Barang dan Jasa	7
18.	Bendahara	7
19.	Penata Laporan Keuangan	6
20.	Verifikator Keuangan	6
21.	Pengadministrasian BMN	6
RUMPUN ADMINISTRASI		
22.	Pengolah Data	7
23.	Sekretaris	6
24.	Pengadministrasian Umum	6
25.	Pengelola Dokumentasi	5
RUMPUN TEKNIS LAINNYA		
26.	Penyusun Bahan Kerjasama	8
27.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
28.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7
29.	Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informasi	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
30.	Pengelola Gedung	6
31.	Pranata Fotografi	6
32.	Pengelola Asrama	6
33.	Petugas Protokol	6
34.	Komandan Petugas Pengamanan	6
35.	Teknisi Laboratorium	5
36.	Petugas Satuan Pengamanan	5
37.	Pengemudi	3

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA